
Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Kajian Hermeneutik terhadap QS. Al-Mā'idah 51, Ali Imran 28, dan An-Nisā' 144

Raifatul Rifka dan Amanda Syahryani

Prodi Ilmu Al quran dan Tafsir, IAIN Lhokseumawe

rifka03@gmail.com, amandaryani269@gmail.com

Article:

Received: 22 April, 2025

Accepted: 26 Mei, 2025

Published: 30 Juni, 2025

© 2025 The Author(s).



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Correspondence Address:

msubky28@gmail.com

Abstrak: Manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Amanah ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga pengelolaan kehidupan sosial, termasuk persoalan kepemimpinan. Dalam konteks negara demokratis dan pluralistik seperti Indonesia, isu kepemimpinan non-Muslim sering memunculkan perdebatan, sebagaimana terlihat pada polemik pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014. Perbedaan pandangan ulama terkait pemimpin non-Muslim berakar pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, di mana sebagian ulama menolak berdasarkan interpretasi tekstual, sementara ulama lain memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kompetensi, dan kemaslahatan. Artikel ini membahas dinamika pemikiran Islam mengenai kepemimpinan non-Muslim di negara hukum Indonesia serta menganalisis argumen ulama yang pro maupun kontra terhadap fenomena tersebut. Kajian ini menggunakan analisis literatur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta konteks sosial-politik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat terkait kepemimpinan non-Muslim tidak hanya berkaitan dengan dalil tekstual, tetapi juga dengan pemahaman terhadap konteks historis, prinsip kemaslahatan, dan karakter negara modern yang inklusif.

Kata Kunci: Khilafah, kepemimpinan, non-Muslim, Indonesia, polarisasi sosial

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan di bumi untuk memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin di bumi Allah ini.¹ Kehidupan di dunia ini diatur bukan hanya merata untuk ibadah kepada Allah, akan tetapi Allah juga mengatur peran manusia sebagai pemimpin yang baik yang mampu membawa kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Manusia sebagai seorang pemimpin bukan hanya memimpin dirinya sendiri, melainkan juga untuk membimbing keluarganya dan saudara-saudaranya yang Muslim untuk menjaga kemashlahatan manusia di dunia. dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

Oleh karena itu, Khilafah merupakan suatu kedudukan yang telah Allah berikan terhadap manusia yang bertujuan agar manusia dapat membimbing, membina, dan mengatur bumi beserta isinya dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya kemampuan yang telah Allah anugerahkan, manusia harus menjaganya dengan baik dan mampu lebih mengembangkan kearah yang jauh lebih baik lagi nantinya untuk generasi yang akan datang. Konteks kepemimpinan di negara Indonesia ini bersifat demokrasi yang mengacu pada bagian: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.² Di tingkatan administratif, pemerintahan dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat negara bagian, seperti kepala desa, camat, walikota/bupati, gubernur, dan presiden. Akan tetapi setiap negara memiliki syarat tersendiri dalam memilih pemimpin, termasuk Indonesia sebuah negara yang penduduknya mayoritas

¹ Rahmat Ilyas, "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam", *Mawaizh Journal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no.1 (1 juni 2016): 169-

95

² Nurhabib, faris. 2022. "konsep kepemimpinan dalam alquran". Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo

memeluk ajaran agama Islam. Mayoritas warga Indonesia tetap masih menolak calon pemimpin atau pemimpin yang sudah terpilih namun bukan beragama Islam.

Ulama berbeda pendapat terkait kepemimpinan non muslim. Sebagian ulama tidak dapat menerima seorang pemimpin di luar dari agama Islam, karena ayat-ayat suci Alquran yang jelas melarang dengan tegas tidak diperbolehkannya umat Islam untuk patuh terhadap pemimpin yang bukan beragama Islam. Tetapi ada sebagian ulama yang membenarkan pemimpin tidak beragama Islam, karena menurut mereka sebuah kepemimpinan tidak terletak atas dasar agama apa yang dipegang, melainkan terletak pada kualitas serta kemampuan pemimpin tersebut dalam mengayomi dan kinerja yang cemerlang untuk masyarakat menjadi negara yang penuh dengan kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Alquran. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji ulang bagaimana pandangan ulama terhadap ayat ayat kepemimpinan non muslim dalam al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik untuk menganalisis konsep kepemimpinan non-Muslim dalam Al-Qur'an. Fokus utama penelitian adalah mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan, seperti Surah Al-Maidah ayat 51, Surat Ali Imran ayat 28, dan Surat An-Nisa ayat 144 serta tafsir-tafsir yang ada untuk memahami bagaimana ayat-ayat ini ditafsirkan oleh ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini juga akan mengkaji perbedaan pandangan antara ulama yang menolak dan yang menerima kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat yang pendudukannya mayoritas Muslim. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir klasik dan modern. Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks sejarah dan sosial,³ serta melihat relevansi ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan kontemporer, terutama dalam hubungan antarumat beragama dalam masyarakat pluralistik.

Hasil Dan Pembahasan

Kepemimpinan Non Muslim

Definisi Pemimpin

Pemimpin berasal dari akar kata "pimpin", yang mendapat tambahan awalan "me", sehingga membentuk kata "memimpin". Secara umum, pemimpin dapat

³ Zulaiha, Siti. "Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Guru MI." *Ar-Riyah: jurnal pendidikan dasar*, 2017.

dipahami sebagai individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi kelompok atau organisasi menuju tujuan tertentu. Pemimpin bukan hanya sekadar orang yang berada di puncak hierarki, tetapi juga sosok yang memiliki kualitas-kualitas tertentu yang memungkinkan mereka untuk memimpin dengan efektif.

Kata "memimpin" memiliki makna yang mencakup berbagai dimensi tanggung jawab, fungsi, dan peran strategis seorang individu dalam mengarahkan kelompok atau komunitas menuju tercapainya tujuan kolektif. Dalam konteks ini, pemimpin diartikan sebagai individu yang bertindak sebagai figur sentral yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk memengaruhi serta mengorganisasi pihak lain. Dengan penambahan prefiks "ke-" dan sufiks "-an" pada kata "pemimpin," terbentuklah istilah "kepemimpinan," yang secara konseptual merujuk pada metode, pendekatan, atau pola perilaku dalam menjalankan fungsi memimpin.⁴ Istilah ini tidak hanya mencakup aspek teknis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dimensi strategis dalam membangun visi, menginspirasi, dan menciptakan harmoni di antara anggota kelompok.

Berbagai perspektif teoretis dari para ahli mengemukakan definisi yang berbeda terkait "kepemimpinan." Seperti yang diungkapkan oleh Harold Knootz dan Cyrill O'Donnell, kepemimpinan merupakan suatu aktivitas yang berfokus pada pengaruh yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada orang-orang di sekitarnya. Definisi ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan arahan atau instruksi, tetapi juga tentang kemampuan pemimpin untuk membuat orang lain tergerak dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bernard M. Bass, dalam bukunya *Leadership and Performance Beyond Expectations*, memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini dianggap sebagai pendekatan yang inovatif karena tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas rutin, tetapi juga mendorong perubahan dan perkembangan yang signifikan dalam organisasi.

Meskipun mereka memberikan wawasan yang berbeda, tetapi saling melengkapi, tentang kepemimpinan. Harold Knootz & Cyrill O'Donnell menekankan pentingnya pengaruh dalam memotivasi kerja sama untuk mencapai tujuan. Bernard M. Bass menggambarkan kepemimpinan sebagai proses transformasional yang berfokus pada visi, inspirasi, dan perubahan. Selain itu, kepemimpinan memiliki dimensi yang mendalam karena berfungsi sebagai mekanisme utama dalam memengaruhi perilaku, motivasi, dan kinerja individu maupun kelompok. Pemimpin

⁴ Arti Kata Pimpin – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', accessed 5 maret 2025

yang efektif mampu menginspirasi, mendorong perubahan positif, serta memfasilitasi pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan progresif dari apa yang sebelumnya dianggap mungkin.⁵

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika pemikiran Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai sudut pandang tersebut secara objektif, menggali dasar-dasar argumen yang digunakan, dan mengeksplorasi bagaimana konsep kepemimpinan Non-Muslim dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Muslim yang pluralistik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara agama, kepemimpinan, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dalam masyarakat modern.

a. Karakteristik Pemimpin Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menetapkan berbagai syarat dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.⁶ Banyak ayat yang menjelaskan kriteria yang perlu dipenuhi oleh pemimpin, di antaranya adalah memiliki iman dan takwa, berlaku adil, dapat dipercaya, terbuka terhadap kritik, jujur, serta berjuang untuk kebaikan:

1. Seorang pemimpin harus memiliki iman dan takwa, sehingga ia dapat menampilkan sifat-sifat yang diajarkan dalam Al-Qur'an. (Q.S. an-Nisa' ayat 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁷

⁵ Soekarso and Iskandar Putong, *KEPEMIMPINAN: Kajian Teoritis dan Praktis* (buku&artikel karya Iskandar Putong, 2015)

⁶ Nurhabib, Faris. "Konsep Kepemimpinan dalam al Qur'an". 2022. Hal.85, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo. Etheses.iainponorogo.ac.id

2. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya (amanah), sehingga ia mampu memimpin dengan memperhatikan kepentingan umat dan mencari ridha Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS. An-Nisa: 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

3. Seorang pemimpin harus berlaku adil dalam memimpin dan mengambil keputusan, tanpa berpihak kepada satu kelompok dan mengabaikan yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS. Al-Hadid ayat 25).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti- bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

B. Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, sejumlah ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan sering menjadi bahan diskusi dalam menentukan pandangan terhadap kepemimpinan non-Muslim, khususnya di masyarakat mayoritas Muslim. Meskipun tidak banyak ayat yang secara eksplisit membahas hal ini, ayat- ayat tersebut umumnya digunakan untuk menyoroti prinsip-prinsip dalam memilih pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Beberapa ayat yang kerap dirujuk Adalah:

1. Surat Ali Imran (3:28): Ayat ini melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai wali (pemimpin atau pelindung) dengan menempatkan

mereka di atas umat Muslim. Namun, ayat ini juga menyebutkan pengecualian dalam keadaan tertentu, yaitu jika ada rasa takut terhadap bahaya. Tafsir klasik, seperti al-Jashas, menekankan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga loyalitas terhadap umat Islam dan menjadikan pemimpin dari kalangan Muslim sebagai prioritas.

2. Surat Al-Nisa (4:144): Ayat ini berisi peringatan untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (pemimpin atau pelindung), dengan menegaskan bahwa keimanan harus menjadi dasar utama dalam memilih pemimpin. Dalam pandangan para mufasir seperti Sayyid Quthb, ayat ini menekankan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu melindungi agama dan kepentingan umat Islam.
3. Surat Al-Maidah (5:51) Salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam diskusi tentang kepemimpinan non-Muslim, ayat ini secara eksplisit melarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali (pemimpin atau pelindung). Tafsir Ibn Kathir dan al-Qurtubi memandang ayat ini sebagai seruan untuk memilih pemimpin dari kalangan Muslim agar nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam pemerintahan.
4. Surat Al-Maidah (5:57) Ayat ini memperingatkan umat Islam untuk tidak menjadikan pemimpin dari kalangan yang mengejek atau menghina agama Islam. Tafsir ayat ini menyoroti pentingnya karakter dan sikap pemimpin terhadap Islam, di mana latar belakang agama tidak menjadi satu-satunya fokus, tetapi juga perilaku terhadap umat Muslim.
5. Surat Al-Mumtahanah (60:1) dan (60:9) Kedua ayat ini mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim, termasuk dalam hal persahabatan dan kepemimpinan. Ayat ini memberikan batasan hubungan dengan non-Muslim yang memusuhi agama, namun tidak melarang hubungan baik dengan non-Muslim yang tidak menunjukkan permusuhan. Tafsir ini sering digunakan oleh ulama kontemporer untuk membahas keterlibatan non-Muslim dalam pemerintahan di masyarakat pluralistik.

Beberapa ulama klasik seperti al-Jashas, al-Zamakhshari, al-Arabi, Ibn Kathir, al-Qurtubi, Wahbah al-Zuhayli, dan Taqiy al-Din Nabani secara umum memiliki pandangan yang cenderung tegas dalam menolak kepemimpinan non-Muslim di tengah masyarakat Muslim. Mereka beralasan bahwa pemimpin harus berasal dari kalangan Muslim agar dapat menjaga prinsip-prinsip Islam, melindungi umat, dan memastikan implementasi syariat. Namun, ada ulama yang menafsirkan ayat-ayat

tersebut dengan pendekatan kontekstual, terutama dalam masyarakat modern yang pluralistik. Mereka berpendapat bahwa kompetensi, keadilan, dan kemampuan pemimpin dalam mengelola pemerintahan adalah faktor yang lebih utama dibanding latar belakang agama.

Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan universal yang juga diajarkan dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dirujuk dalam diskusi mengenai kepemimpinan non-Muslim memberikan landasan normatif yang beragam. Sebagian besar ulama klasik menekankan pentingnya memilih pemimpin Muslim untuk menjaga identitas dan kepentingan Islam. Namun, ulama kontemporer mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik dan prinsip-prinsip keadilan. Diskusi ini tetap relevan, terutama dalam dinamika masyarakat modern yang pluralistik dan demokratis.

Salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar untuk menentang kepemimpinan non-Muslim adalah Surat Al-Maidah (5:51), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ
مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”*

Ayat ini sering dipahami sebagai peringatan bagi umat Islam agar tidak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau sekutu yang memiliki kekuasaan atas mereka. Menurut beberapa penafsir, seperti Buya Hamka, ayat ini memberikan peringatan keras bagi umat Muslim untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Buya Hamka berpendapat bahwa menjadikan pemimpin non-Muslim berarti menunjukkan kesetiaan yang tidak seharusnya dimiliki terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Hamka menjelaskan bahwa jika seorang Muslim memilih Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin, ia secara implisit menyatakan kesetiaannya terhadap mereka, yang dapat mengarah pada pengaruh ideologi dan prinsip-prinsip yang bertolak dengan ajaran Islam.

Buya Hamka menjelaskan bahwa memilih pemimpin non-Muslim dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi umat Islam, terutama dalam hal aqidah,

praktik keagamaan, dan arah kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Hamka memperingatkan bahwa kepemimpinan non- Muslim berpotensi membawa umat Islam pada bahaya terjerumus ke dalam "thaghut," yaitu konsep menyembah atau mengikuti sesuatu selain Allah,⁷ serta mengambil jalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangannya, menjaga kemurnian aqidah dan nilai-nilai keislaman menjadi prioritas utama, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Hamka menekankan bahwa pemimpin yang tidak beriman kepada Allah mungkin tidak memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan spiritual umat Islam.⁸ Kebijakan yang dihasilkan pun berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga dapat memengaruhi pola pikir, praktik keagamaan, dan kehidupan sosial-politik masyarakat Muslim. Dalam hal ini, pemimpin yang tidak memiliki pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dikhawatirkan akan memengaruhi umat secara negatif, baik secara langsung melalui kebijakan maupun secara tidak langsung melalui perubahan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pandangan Hamka mencerminkan kehati-hatian dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap ajaran Islam. Menurutnya, pemimpin yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tidak hanya bertugas sebagai pengelola pemerintahan, tetapi juga sebagai pelindung dan pembimbing umat Muslim dalam menjaga keimanan dan kehidupan yang sesuai dengan syariat. Dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Hamka berpendapat bahwa memilih pemimpin yang memahami dan menghormati nilai-nilai Islam sangat penting untuk memastikan kestabilan sosial, harmoni, dan keberlanjutan praktik keislaman dalam kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, pandangan Hamka memberikan perspektif yang menekankan pentingnya konsistensi antara kepemimpinan dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Ia mengingatkan bahwa dalam memilih pemimpin, umat Muslim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap aqidah dan kehidupan mereka, serta memastikan bahwa pemimpin tersebut memiliki keberpihakan terhadap kepentingan Islam dan umatnya. Namun, meskipun terdapat pandangan yang menentang kepemimpinan non-Muslim, penting untuk dicatat bahwa ada juga penafsiran yang lebih fleksibel dalam memahami ayat-ayat ini. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa konteks sejarah dan sosial harus

⁷ Imron Alfaruq, Suharjianto. 2019. "Kepemimpinan Non-muslim Dalam Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka". 31 (1): 80. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁸ Susanti, F., Fitri, L., Wastri, L., Demina. 2024. : "Konsep Pemimpin dalam Islam; analisis terhadap Pemikiran Abuya Hamka". 10 (2): 35. Batu Sangkar: Universitas Islam Mahmud Yunus

dipertimbangkan dalam menafsirkan teks-teks tersebut. Misalnya, dalam situasi di mana negara memiliki sistem pemerintahan multikultural atau mayoritas penduduknya beragama Islam namun memiliki keberagaman keyakinan, terdapat ruang untuk merenungkan penerimaan terhadap pemimpin non-Muslim, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam hukum Islam.

Al-Qur'an memberikan berbagai perspektif terkait dengan kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Muslim. Ayat-ayat seperti Surat Al-Maidah (5:51) dan lainnya sering dijadikan dasar untuk menentang kepemimpinan non-Muslim, terutama dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pandangan seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih pemimpin yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena adanya risiko pengaruh ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan. Namun, perdebatan tentang kepemimpinan non-Muslim ini tetap relevan dalam konteks sosial-politik kontemporer, di mana ada pendapat yang lebih inklusif mengenai penerimaan pemimpin non-Muslim dalam masyarakat pluralistik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Penafsiran yang cermat dan kontekstual terhadap teks-teks ini akan terus menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antara agama, kepemimpinan, dan negara dalam kerangka Islam.

Dalam hal lain juga dijelaskan:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا ۗ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Q.S ali imran:28)

Terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan dalam diskusi mengenai larangan memilih pemimpin non-Muslim, terutama di kalangan mayoritas Muslim. Selain QS. Ali Imran (3:28), terdapat ayat-ayat lain seperti QS. al-Ma'idah

(5:57), QS. al-Mumtahanah (60:1), QS. Âli ‘Imrân (3:100, 118), QS. al-Mujâdilah (58:22), QS. al-Nisâ’ (4:139, 141), QS. al-Anfâl (8:73), dan QS. al-Tawbah (9:8). Secara umum, ayat-ayat ini mengandung pesan yang serupa, yakni larangan bagi umat Islam untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, pelindung, atau wali. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir at-Thobari dari Ibn ‘Abbas, QS. Ali Imran (3:28) diturunkan dalam konteks di mana beberapa tokoh Yahudi, seperti Al-Hajjaj bin Amr, Ka’ab bin al-Asyraf, Ibnu Abil Haqiq, dan Qais bin Zaid, tinggal dan bergaul dengan orang-orang Anshar. Tujuan mereka adalah untuk memengaruhi keimanan kaum Muslimin dan membujuk mereka meninggalkan Islam.⁹ Menyadari ancaman ini, sahabat seperti Rifa’ah ibnul Mundzir, Abdullah bin Zubair, dan Sa’id bin Hatsamah mengingatkan umat Islam agar menjauhi para tokoh Yahudi tersebut. Kemudian turunlah QS. Ali Imran (3:28) sebagai peringatan agar umat Islam berhati-hati dalam berinteraksi dengan non-Muslim yang memusuhi agama Islam.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini melarang umat Islam menjadikan orang kafir sebagai wali (pemimpin atau pelindung). Larangan ini muncul dalam konteks kekhawatiran bahwa umat Islam dapat terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, Ibnu Katsir juga mencatat adanya pengecualian, yaitu ketika umat Islam berada dalam kondisi bahaya atau di wilayah kekuasaan non-Muslim, di mana tindakan demikian dapat dilakukan sebagai langkah taktis. Riwayat terkait sahabat ‘Ubadah bin Samit al-Anshari dalam konteks lain, riwayat dari Ibn ‘Abbas menyebutkan bahwa QS. Ali Imran (3:28) berkaitan dengan sahabat ‘Ubadah bin Samit al-Anshari, seorang sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat bersiap untuk perang, ‘Ubadah menawarkan bantuan dari lima puluh laki-laki Yahudi untuk memperkuat pasukan Islam. Namun, ayat ini diturunkan sebagai peringatan untuk tidak terlalu mengandalkan orang-orang kafir, bahkan dalam situasi perang.

Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menekankan bahwa QS. Ali Imran (3:28) melarang umat Islam untuk memihak atau menjalin hubungan terlalu erat dengan orang kafir, baik dalam urusan keluarga, persahabatan, maupun tetangga, jika hubungan tersebut dapat membahayakan keimanan umat Islam. Namun, az-Zuhaili juga menegaskan bahwa jika hubungan tersebut membawa kemaslahatan yang jelas, maka hal itu diperbolehkan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad pernah menjalin perjanjian dan sekutu dengan Bani Khuza’ah yang masih berada dalam keadaan musyrik demi menjaga stabilitas keamanan.

⁹ Bilhaq, M. Agus Muhtadi. 2018. "Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non- muslim dalam Perspektif Alquran dan Hadis, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 2 (2): 120.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas larangan menjadikan non- Muslim sebagai pemimpin memiliki konteks historis yang berkaitan dengan kondisi umat Islam saat itu, terutama ketika mereka menghadapi ancaman dari kelompok yang memusuhi Islam. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al- Qurthubi, dan Wahbah az- Zuhaili menekankan pentingnya menjaga keimanan umat Islam dengan tidak terlalu bergantung pada non-Muslim, terutama dalam urusan kepemimpinan. Namun, dalam konteks tertentu, seperti kemaslahatan bersama atau situasi darurat, terdapat pengecualian yang dapat dipertimbangkan. Pemahaman terhadap ayat-ayat ini perlu mempertimbangkan konteks historis dan kondisi sosial-politik masyarakat Muslim di masa kini.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat dua kelompok ayat yang secara tegas melarang umat Islam menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin – kata "auliā'" sering diterjemahkan sebagai pemimpin. Kelompok pertama adalah ayat-ayat yang menggunakan kata "kāfirīn" (dari kata dasar "kafara"), seperti QS. 3:28 dan QS. 4:144. Ayat-ayat ini secara jelas melarang umat Islam menjadikan orang kafir sebagai auliā' dan mengancam orang-orang beriman yang melanggar larangan ini (lā tattakhizū al-kāfirīn auliā'). Kelompok kedua adalah ayat yang menggunakan kata "al-yahūd" dan "al-naṣāra", seperti QS. 5:51. Ayat-ayat ini juga melarang umat Islam untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai auliā' (lā tattakhizū al-yahūda wa al-naṣārā). Ayat serupa juga dapat ditemukan dalam QS. 8:73, meskipun ayat ini tidak menggunakan redaksi larangan eksplisit, namun hanya menyatakan bahwa orang kafir menjadi pelindung bagi kafir lainnya. Semua ayat tersebut termasuk dalam kategori ayat Madaniyah. Manna' Khalil al-Qattan menjelaskan bahwa ayat-ayat Madaniyah memiliki ciri khas,¹⁰ yaitu lebih banyak membahas hal-hal terkait ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, serta kaidah hukum dan perundang-undangan (Al-Qattan, 2007:87). Hal ini sesuai dengan isi ayat-ayat yang telah disebutkan.

KESIMPULAN

Keberadaan manusia di bumi sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi Khilafah, yaitu sebagai wakil Allah SWT dalam mengelola dan mengarahkan alam semesta demi mencapai kesejahteraan umat manusia. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi ini dengan

¹⁰ Husni, Muhammad. 2019. "Studi Alquran: Teori Almakkiyah dan Almadaniyah, Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam, 4 (2): 79. Malang: IAI AlQolam Gondanglegi.

penuh kebijaksanaan dan keberlanjutan. Allah SWT memberikan manusia potensi akal yang memungkinkan mereka untuk mempelajari dan memahami rahasia alam serta menerapkannya demi kemaslahatan umat manusia. Dengan potensi tersebut, manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan alam dan menjamin bahwa sumber daya alam yang ada dapat dikelola dengan baik untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga bumi tetap lestari dan kehidupan manusia tetap berkembang.

Khilafah juga mencerminkan posisi atau kedudukan yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengatur dan menjaga keteraturan kehidupan di dunia. Fungsi ini bukan hanya terbatas pada pengelolaan alam, tetapi juga mencakup peran sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan yang demokratis seperti Indonesia, Pemimpin memegang tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas administratif, baik di tingkat daerah maupun negara. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemimpin terdiri dari tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang semuanya bekerja bersama untuk menciptakan tatanan yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilhaq, M. Agus Muhtadi. 2018. *"Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-muslim dalam Perspektif Alquran dan Hadis*, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 2 (2)
- Husni, Muhammad. 2019. *"Studi Alquran: Teori Almakkiyah dan Almadaniyah*, Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam, 4 (2): 79. Malang: IAI AlQolam Gondanglegi.
- Imron Alfaruq, Suharjianto. 2019. *"Kepemimpinan Non-muslim Dalam Tafsir Al Azhar*
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
- Karya Buya Hamka". 31 (1): 80. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Nurhabib, faris. 2022. *"konsep kepemimpinan dalam alquran"*. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Rahmat Ilyas, "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam", Mawaizhzh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 7, no.1 (1 juni 2016

Soekarso and Iskandar Putong, *KEPEMIMPINAN: Kajian Teoritis dan Praktis* (buku&artikel karya Iskandar Putong, 2015)

Susanti, F., Fitri, L., Wastri, L., Demina. 2024. : “Konsep Pemimpin dalam Islam; analisis terhadap Pemikiran Abuya Hamka”. 10 (2): 35. Batu Sangkar: Universitas Islam Mahmud Yunus

Zulaiha, Siti. “Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Guru MI.” *Ar-Riyah: jurnal pendidikan dasar*, 2017.